



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur secara khusus Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan Tanggal 19 Desember 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (26), sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom dan/atau at - cost.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
  - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
  - b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. uang representasi.
- (4) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b dengan moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
  - a. seluruh biaya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat kegiatan mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan;

- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- c. pengeluaran e-Tol/e-Parking; dan/atau;
- d. khusus perjalanan dinas luar daerah biaya transportasi dibayarkan dengan mekanisme at-cost;

(8) Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggota forkopimda disetarakan dengan uang harian perjalanan dinas eselon IIa;
- b. organisasi PKK/Dharma wanita :
  - 1) ketua/wakil ketua disetarakan pejabat eselon IIb;
  - 2) sekretaris / bendahara / ketua pokja disetarakan dengan pejabat eselon III,
  - 3) anggota disetarakan dengan golongan III,
  - 4) pengurus yang berstatus ASN diberlakukan sesuai golongannya,
- c. pegawai kontrak waktu tertentu/kelompok masyarakat/kelompok UKM/kelompok tani/lainnya disetarakan dengan kelompok ASN golongan II.

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat kegiatan kecuali Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(11) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginap dan/atau bermalam bukan termasuk penginapan sebagai transit sementara.
- (13) Dikecualikan dari ketentuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), biaya penginapan transit hanya diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (14) Termasuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), apabila merupakan biaya paket akomodasi yang harus disetor Kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan dan/atau dibayar langsung oleh peserta kegiatan, maka biaya tersebut menjadi beban biaya perjalanan dinas dihitung secara at-cost.
- (15) Ketentuan dan besaran biaya penginapan di bayarkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan kegiatan dengan menyertakan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Klasifikasi dan besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Uang Harian luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas minimal 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari yang besarnya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (19) Dalam hal pelaksanaan Bimtek kurang dari 3 (tiga) hari diberikan Uang Harian Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari atau paling lama 5 (lima) hari, kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir, selanjutnya untuk hari kedua dan seterusnya sampai dengan hari menjelang berakhirnya kegiatan, diberikan berdasarkan ketentuan pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Uang harian dalam rangka bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional lebih dari 5 (lima) hari yang di ikuti oleh BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (22) Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) juga berlaku pada kegiatan termasuk tapi tidak terbatas pada sosialisasi, workshop, pelatihan dan/atau seminar.
- (23) Apabila pelaksana perjalanan dinas meninggal dunia saat melaksanakan tugas, maka biaya perjalanan dinas luar daerah tetap diberikan termasuk biaya menjemput, mengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Penjemput dan pengantar jenazah diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 6 (enam) orang selama-lamanya 3 (tiga) hari.
- (25) Selain biaya perjalanan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan biaya test Kesehatan secara at - cost.

- (26) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian;
  - b. uang representasi;
  - c. uang transportasi;
  - d. uang penginapan,
- dibayarkan secara Lumpsum sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (3) Ketentuan mengenai biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (15).
- (4) Ketentuan mengenai tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

#### Pasal 4B

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilampiri rincian biaya Perjalanan Dinas dengan dokumen- dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Surat tugas yang sah.
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.



- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas.
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- f. Boarding pass/airport tax/retribusi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya dan/atau bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya sebagai bukti perjalanan dinas telah dilaksanakan;
- g. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 151 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
 BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 (JARAK TEMPUH MINIMAL 5 KM)

A. EKSEKUTIF

| NO | Jabatan   | Satuan     | Uang Harian | Biaya Transportasi |
|----|---|------------|-------------|--------------------|
| 1  | Bupati  | Orang/hari | Rp160.000   | Rp100.000          |
| 2  | Wakil Bupati  | Orang/hari | Rp150.000   | Rp100.000          |
| 3  | Sekretaris Daerah/Eselon II a   | Orang/hari | Rp130.000   | Rp100.000          |
| 4  | Pejabat Eselon II b   | Orang/hari | Rp130.000   | Rp100.000          |
| 5  | Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)   | Orang/hari | Rp120.000   | Rp100.000          |
| 6  | Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan | Orang/hari | Rp110.000   | Rp100.000          |
| 7  | Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV                    | Orang/hari | Rp100.000   | Rp80.000           |
| 8  | PNS Gol III/ PPPK Gol IX dan Gol X  | Orang/hari | Rp90.000    | Rp70.000           |
| 9  | PNS Gol I dan Gol II/ PPPK Gol V dan Gol VII  | Orang/hari | Rp80.000    | Rp60.000           |
| 10 | Pengemudi   | Orang/hari | Rp70.000    | -                  |

B. LEGISLATIF

| NO | Jabatan          | Satuan     | Uang Harian | Biaya Transportasi |
|----|------------------|------------|-------------|--------------------|
| 1  | Ketua DPRD       | Orang/hari | Rp150.000   | Rp100.000          |
| 2  | Wakil Ketua DPRD | Orang/hari | Rp140.000   | Rp100.000          |
| 3  | Anggota DPRD     | Orang/hari | Rp130.000   | Rp100.000          |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG HARIAN  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

| NO | PROVINSI            | SATUAN | JABATAN   |              |                                       |                     |   |   |   |                                     |   |           |
|----|---------------------|--------|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|-----------|
|    |                     |        | Bupati    | Wakil Bupati | Sekretaris Daerah/ Pejabat Eselon IIA | Pejabat Eselon II b | Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah) | Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan (Bukan Kepala Perangkat Daerah) | Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV | PNS Gol III / PPPK Gol IX dan Gol X | PNS Gol I dan Gol II / PPPK Gol V dan Gol VII | Pengemudi |
| 1  | 2                   | 3      | 4         | 5            | 6                                     | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11                                  | 12  | 13        |
| 1  | ACEH                | OH     | Rp360.000 | Rp360.000    | Rp360.000                             | Rp350.000           | Rp340.000                                     | Rp330.000   | Rp320.000   | Rp310.000                           | Rp300.000                                     | Rp290.000 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp300.000 |
| 3  | RIAU                | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp300.000 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp300.000 |
| 5  | JAMBI               | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp300.000 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp380.000 | Rp380.000    | Rp380.000                             | Rp370.000           | Rp360.000                                     | Rp350.000   | Rp340.000   | Rp330.000                           | Rp320.000                                     | Rp310.000 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp380.000 | Rp380.000    | Rp380.000                             | Rp370.000           | Rp360.000                                     | Rp350.000   | Rp340.000   | Rp330.000                           | Rp320.000                                     | Rp310.000 |
| 8  | LAMPUNG             | OH     | Rp380.000 | Rp380.000    | Rp380.000                             | Rp370.000           | Rp360.000                                     | Rp350.000   | Rp340.000   | Rp330.000                           | Rp320.000                                     | Rp310.000 |
| 9  | BENGKULU            | OH     | Rp380.000 | Rp380.000    | Rp380.000                             | Rp370.000           | Rp360.000                                     | Rp350.000   | Rp340.000   | Rp330.000                           | Rp320.000                                     | Rp310.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp410.000 | Rp410.000    | Rp410.000                             | Rp400.000           | Rp390.000                                     | Rp380.000   | Rp370.000   | Rp360.000                           | Rp350.000                                     | Rp340.000 |
| 11 | BANTEN              | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp310.000 |
| 12 | JAWA BARAT          | OH     | Rp430.000 | Rp430.000    | Rp430.000                             | Rp420.000           | Rp410.000                                     | Rp400.000   | Rp390.000   | Rp380.000                           | Rp370.000                                     | Rp350.000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp530.000 | Rp530.000    | Rp530.000                             | Rp520.000           | Rp510.000                                     | Rp500.000   | Rp490.000   | Rp480.000                           | Rp470.000                                     | Rp350.000 |
| 14 | JAWA TENGAH         | OH     | Rp370.000 | Rp370.000    | Rp370.000                             | Rp360.000           | Rp350.000                                     | Rp340.000   | Rp330.000   | Rp320.000                           | Rp310.000                                     | Rp300.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp420.000 | Rp420.000    | Rp420.000                             | Rp410.000           | Rp400.000                                     | Rp390.000   | Rp380.000   | Rp370.000                           | Rp360.000                                     | Rp300.000 |
| 16 | JAWA TIMUR          | OH     | Rp410.000 | Rp410.000    | Rp410.000                             | Rp400.000           | Rp390.000                                     | Rp380.000   | Rp370.000   | Rp360.000                           | Rp350.000                                     | Rp300.000 |
| 17 | BALI                | OH     | Rp480.000 | Rp480.000    | Rp480.000                             | Rp470.000           | Rp460.000                                     | Rp450.000   | Rp440.000   | Rp430.000                           | Rp420.000                                     | Rp410.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp440.000 | Rp440.000    | Rp440.000                             | Rp430.000           | Rp420.000                                     | Rp410.000   | Rp400.000   | Rp390.000                           | Rp380.000                                     | Rp370.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp430.000 | Rp430.000    | Rp430.000                             | Rp420.000           | Rp410.000                                     | Rp400.000   | Rp390.000   | Rp380.000                           | Rp370.000                                     | Rp360.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp380.000 | Rp380.000    | Rp380.000                             | Rp370.000           | Rp360.000                                     | Rp350.000   | Rp340.000   | Rp330.000                           | Rp320.000                                     | Rp310.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp360.000 | Rp360.000    | Rp360.000                             | Rp350.000           | Rp340.000                                     | Rp330.000   | Rp320.000   | Rp310.000                           | Rp300.000                                     | Rp290.000 |

|    |                    |    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR   | OH | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 | Rp400.000 | Rp390.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA   | OH | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 | Rp400.000 | Rp390.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA     | OH | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 | Rp300.000 |
| 26 | GORONTALO          | OH | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 | Rp300.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT     | OH | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp400.000 | Rp390.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN   | OH | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 | Rp400.000 | Rp390.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH    | OH | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 | Rp300.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA  | OH | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 |
| 31 | MALUKU             | OH | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 | Rp350.000 | Rp340.000 | Rp330.000 | Rp320.000 | Rp310.000 |
| 32 | MALUKU UTARA       | OH | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 | Rp400.000 | Rp390.000 | Rp380.000 | Rp370.000 | Rp360.000 |
| 33 | PAPUA              | OH | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp570.000 | Rp560.000 | Rp550.000 | Rp540.000 | Rp530.000 | Rp520.000 | Rp510.000 |
| 34 | PAPUA BARAT        | OH | Rp480.000 | Rp480.000 | Rp480.000 | Rp470.000 | Rp460.000 | Rp450.000 | Rp440.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA   | OH | Rp480.000 | Rp480.000 | Rp480.000 | Rp470.000 | Rp460.000 | Rp450.000 | Rp440.000 | Rp430.000 | Rp420.000 | Rp410.000 |
| 36 | PAPUA TENGAH       | OH | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp570.000 | Rp560.000 | Rp550.000 | Rp540.000 | Rp530.000 | Rp520.000 | Rp510.000 |
| 37 | PAPUA SELATAN      | OH | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp570.000 | Rp560.000 | Rp550.000 | Rp540.000 | Rp530.000 | Rp520.000 | Rp510.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN   | OH | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp580.000 | Rp570.000 | Rp560.000 | Rp550.000 | Rp540.000 | Rp530.000 | Rp520.000 | Rp510.000 |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 151 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
 BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG HARIAN  
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT DAERAH

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | JABATAN    |                  |              |
|-----|---------------------|--------|------------|------------------|--------------|
|     |                     |        | KETUA DPRD | WAKIL KETUA DPRD | ANGGOTA DPRD |
| 1   | ACEH                | OH     | Rp360.000  | Rp360.000        | Rp360.000    |
| 2   | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 3   | RIAU                | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 4   | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 5   | JAMBI               | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 6   | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 7   | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 8   | LAMPUNG             | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 9   | BENGKULU            | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 10  | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp410.000  | Rp410.000        | Rp410.000    |
| 11  | BANTEN              | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 12  | JAWA BARAT          | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 13  | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp530.000  | Rp530.000        | Rp530.000    |
| 14  | JAWA TENGAH         | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 15  | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp420.000  | Rp420.000        | Rp420.000    |
| 16  | JAWA TIMUR          | OH     | Rp410.000  | Rp410.000        | Rp410.000    |
| 17  | BALI                | OH     | Rp480.000  | Rp480.000        | Rp480.000    |
| 18  | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp440.000  | Rp440.000        | Rp440.000    |
| 19  | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 20  | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 21  | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp360.000  | Rp360.000        | Rp360.000    |
| 22  | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 23  | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 24  | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 25  | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 26  | GORONTALO           | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 27  | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp410.000  | Rp410.000        | Rp410.000    |
| 28  | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 29  | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp370.000  | Rp370.000        | Rp370.000    |
| 30  | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 31  | MALUKU              | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 32  | MALUKU UTARA        | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 33  | PAPUA               | OH     | Rp580.000  | Rp580.000        | Rp580.000    |
| 34  | PAPUA BARAT         | OH     | Rp480.000  | Rp480.000        | Rp480.000    |
| 35  | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp380.000  | Rp380.000        | Rp380.000    |
| 36  | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp430.000  | Rp430.000        | Rp430.000    |
| 37  | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp580.000  | Rp580.000        | Rp580.000    |
| 38  | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp480.000  | Rp480.000        | Rp480.000    |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 151 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
 BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

A. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN   | MODA TRANSPORTASI |            |                |          |
|----|--|-------------------|------------|----------------|----------|
|    |  | Pesawat           | Kapal Laut | Kereta Api/Bus | Lainnya  |
| 1  | 2  | 3                 | 4          | 5              | 6        |
| 1  | Bupati   | Bisnis            | Kelas 1-B  | Eksekutif      | at- cost |
| 2  | Wakil Bupati   | Bisnis            | Kelas 1-B  | Eksekutif      | at- cost |
| 3  | Sekretaris Daerah/ Eselon II a   | Bisnis            | Kelas 1-B  | Eksekutif      | at- cost |
| 4  | Pejabat Eselon II b  | Bisnis            | Kelas 1-B  | Eksekutif      | at- cost |
| 5  | Eselon III a (Kepala Perangkat Daerah)   | Ekonomi           | Kelas II-A | Eksekutif      | at- cost |
| 6  | Eselon III / Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan (Bukan Kepala Perangkat Daerah) | Ekonomi           | Kelas II-A | Eksekutif      | at- cost |
| 7  | Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan PNS Gol IV            | Ekonomi           | Kelas II-A | Eksekutif      | at- cost |
| 8  | PNS Gol III / PPPK Gol IX dan Gol X  | Ekonomi           | Kelas II-A | Eksekutif      | at- cost |
| 9  | PNS Gol I dan Gol II / PPPK Gol V dan Gol VII  | Ekonomi           | Kelas II-A | Eksekutif      | at- cost |

B. BESARAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

| NO | KOTA       |                | SATUAN BIAYA TIKET |            |
|----|------------|----------------|--------------------|------------|
|    | ASAL       | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI    |
| 1  | 2          | 3              | 4                  | 5          |
| 1  | JAKARTA    | AMBON          | 13.285.000         | 7.081.000  |
| 2  | JAKARTA    | BALIKPAPAN     | 7.412.000          | 3.797.000  |
| 3  | JAKARTA    | BANDA ACEH     | 7.519.000          | 4.492.000  |
| 4  | JAKARTA    | BANDAR LAMPUNG | 2.407.000          | 1.583.000  |
| 5  | JAKARTA    | BANJARMASIN    | 5.252.000          | 2.995.000  |
| 6  | JAKARTA    | BATAM          | 4.867.000          | 2.888.000  |
| 7  | JAKARTA    | BENGKULU       | 4.364.000          | 2.621.000  |
| 8  | JAKARTA    | BLIAK          | 14.065.000         | 3.262.000  |
| 9  | JAKARTA    | DENPASAR       | 5.305.000          | 3.262.000  |
| 10 | JAKARTA    | GORONTALO      | 7.231.000          | 4.824.000  |
| 11 | JAKARTA    | JAMBI          | 4.065.000          | 2.460.000  |
| 12 | JAKARTA    | JAYAPURA       | 14.568.000         | 8.193.000  |
| 13 | JAKARTA    | JOGYAKARTA     | 4.107.000          | 2.268.000  |
| 14 | JAKARTA    | KENDARI        | 7.658.000          | 4.182.000  |
| 15 | JAKARTA    | KUPANG         | 9.413.000          | 5.081.000  |
| 16 | JAKARTA    | MAKASAR        | 7.444.000          | 3.829.000  |
| 17 | JAKARTA    | MALANG         | 4.599.000          | 2.695.000  |
| 18 | JAKARTA    | MAMUJU         | 7.295.000          | 4.867.000  |
| 19 | JAKARTA    | MANADO         | 10.824.000         | 5.102.000  |
| 20 | JAKARTA    | MANOKWARI      | 16.226.000         | 10.824.000 |
| 21 | JAKARTA    | MATARAM        | 5.316.000          | 3.230.000  |
| 22 | JAKARTA    | MEDAN          | 7.252.000          | 3.808.000  |
| 23 | JAKARTA    | PADANG         | 5.530.000          | 2.952.000  |
| 24 | JAKARTA    | PALANGKARAYA   | 4.984.000          | 2.984.000  |
| 25 | JAKARTA    | PALEMBANG      | 3.861.000          | 2.268.000  |
| 26 | JAKARTA    | PALU           | 9.348.000          | 5.113.000  |
| 27 | JAKARTA    | PANGKAL PINANG | 3.412.000          | 2.139.000  |
| 28 | JAKARTA    | PEKANBARU      | 5.583.000          | 3.016.000  |
| 29 | JAKARTA    | PONTIANAK      | 4.353.000          | 2.781.000  |
| 30 | JAKARTA    | SEMARANG       | 3.861.000          | 2.182.000  |
| 31 | JAKARTA    | SOLO           | 3.861.000          | 2.342.000  |
| 32 | JAKARTA    | SURABAYA       | 5.466.000          | 2.674.000  |
| 33 | JAKARTA    | TERNATE        | 10.001.000         | 6.664.000  |
| 34 | JAKARTA    | TIMIKA         | 13.830.000         | 7.487.000  |
| 35 | AMBON      | DENPASAR       | 8.054.000          | 4.471.000  |
| 36 | AMBON      | JAYAPURA       | 7.434.000          | 4.161.000  |
| 37 | AMBON      | KENDARI        | 4.824.000          | 2.856.000  |
| 38 | AMBON      | MAKASAR        | 6.022.000          | 3.455.000  |
| 39 | AMBON      | MANOKWARI      | 5.177.000          | 3.027.000  |
| 40 | AMBON      | PALU           | 6.140.000          | 3.508.000  |
| 41 | AMBON      | SORONG         | 3.637.000          | 2.257.000  |
| 42 | AMBON      | SURABAYA       | 8.803.000          | 4.845.000  |
| 43 | AMBON      | TERNATE        | 4.022.000          | 2.449.000  |
| 44 | BALIKPAPAN | BANDA ACEH     | 12.739.000         | 6.749.000  |
| 45 | BALIKPAPAN | BATAM          | 10.354.000         | 5.305.000  |
| 46 | BALIKPAPAN | DENPASAR       | 10.739.000         | 5.648.000  |
| 47 | BALIKPAPAN | JAYAPURA       | 19.071.000         | 10.086.000 |
| 48 | BALIKPAPAN | JOGYAKARTA     | 9.669.000          | 4.749.000  |
| 49 | BALIKPAPAN | MAKASAR        | 12.664.000         | 6.150.000  |
| 50 | BALIKPAPAN | MANADO         | 15.702.000         | 7.295.000  |



|     |                |                |            |            |
|-----|----------------|----------------|------------|------------|
| 51  | BALIKPAPAN     | MEDAN          | 12.493.000 | 6.140.000  |
| 52  | BALIKPAPAN     | PADANG         | 10.942.000 | 5.369.000  |
| 53  | BALIKPAPAN     | PALEMBANG      | 9.445.000  | 4.749.000  |
| 54  | BALIKPAPAN     | PEKANBARU      | 10.996.000 | 5.423.000  |
| 55  | BALIKPAPAN     | SEMARANG       | 9.445.000  | 4.674.000  |
| 56  | BALIKPAPAN     | SOLO           | 9.445.000  | 4.813.000  |
| 57  | BALIKPAPAN     | SURABAYA       | 10.889.000 | 5.113.000  |
| 58  | BALIKPAPAN     | TIMIKA         | 18.408.000 | 9.445.000  |
| 59  | BANDA ACEH     | DENPASAR       | 10.835.000 | 6.279.000  |
| 60  | BANDA ACEH     | JAYAPURA       | 19.167.000 | 10.717.000 |
| 61  | BANDA ACEH     | JOGYAKARTA     | 9.765.000  | 5.380.000  |
| 62  | BANDA ACEH     | MAKASAR        | 12.760.000 | 6.781.000  |
| 63  | BANDA ACEH     | MANADO         | 15.798.000 | 7.926.000  |
| 64  | BANDA ACEH     | PONTIANAK      | 9.990.000  | 5.840.000  |
| 65  | BANDA ACEH     | SEMARANG       | 9.530.000  | 5.305.000  |
| 66  | BANDA ACEH     | SOLO           | 9.530.000  | 5.444.000  |
| 67  | BANDA ACEH     | SURABAYA       | 10.985.000 | 5.744.000  |
| 68  | BANDA ACEH     | TIMIKA         | 18.504.000 | 10.076.000 |
| 69  | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN     | 8.129.000  | 4.129.000  |
| 70  | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH     | 8.225.000  | 4.760.000  |
| 71  | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN    | 6.193.000  | 3.412.000  |
| 72  | BANDAR LAMPUNG | BATAM          | 5.840.000  | 3.316.000  |
| 73  | BANDAR LAMPUNG | BLIAK          | 14.119.000 | 7.487.000  |
| 74  | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR       | 6.236.000  | 3.647.000  |
| 75  | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA       | 14.568.000 | 8.097.000  |
| 76  | BANDAR LAMPUNG | JOGYAKARTA     | 5.155.000  | 2.760.000  |
| 77  | BANDAR LAMPUNG | KENDARI        | 8.354.000  | 4.482.000  |
| 78  | BANDAR LAMPUNG | MAKASAR        | 8.161.000  | 4.161.000  |
| 79  | BANDAR LAMPUNG | MALANG         | 5.594.000  | 3.134.000  |
| 80  | BANDAR LAMPUNG | MANADO         | 11.199.000 | 5.305.000  |
| 81  | BANDAR LAMPUNG | MATARAM        | 6.246.000  | 3.626.000  |
| 82  | BANDAR LAMPUNG | MEDAN          | 7.979.000  | 4.150.000  |
| 83  | BANDAR LAMPUNG | PADANG         | 6.439.000  | 3.380.000  |
| 84  | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA   | 5.947.000  | 3.401.000  |
| 85  | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG      | 4.931.000  | 2.760.000  |
| 86  | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU      | 6.482.000  | 3.433.000  |
| 87  | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK      | 5.380.000  | 3.220.000  |
| 88  | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG       | 4.931.000  | 2.685.000  |
| 89  | BANDAR LAMPUNG | SOLO           | 4.931.000  | 2.824.000  |
| 90  | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA       | 6.386.000  | 3.123.000  |
| 91  | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA         | 13.905.000 | 7.455.000  |
| 92  | BANDUNG        | BATAM          | 6.289.000  | 3.583.000  |
| 93  | BANDUNG        | DENPASAR       | 5.626.000  | 3.252.000  |
| 94  | BANDUNG        | JAKARTA        | 2.064.000  | 1.476.000  |
| 95  | BANDUNG        | JAMBI          | 5.006.000  | 2.941.000  |
| 96  | BANDUNG        | JOGYAKARTA     | 3.369.000  | 2.129.000  |
| 97  | BANDUNG        | PADANG         | 6.129.000  | 3.508.000  |
| 98  | BANDUNG        | PALEMBANG      | 4.385.000  | 2.631.000  |
| 99  | BANDUNG        | PANGKAL PINANG | 4.599.000  | 2.738.000  |
| 100 | BANDUNG        | PEKANBARU      | 6.525.000  | 3.701.000  |
| 101 | BANDUNG        | SEMARANG       | 3.027.000  | 1.957.000  |
| 102 | BANDUNG        | SOLO           | 3.647.000  | 2.268.000  |
| 103 | BANDUNG        | SURABAYA       | 4.824.000  | 2.856.000  |
| 104 | BANDUNG        | TANJUNG PANDAN | 4.439.000  | 2.663.000  |
| 105 | BANJARMASIN    | BANDA ACEH     | 10.792.000 | 6.022.000  |
| 106 | BANJARMASIN    | BATAM          | 8.407.000  | 4.578.000  |

|     |             |              |            |            |
|-----|-------------|--------------|------------|------------|
| 107 | BANJARMASIN | BIAK         | 16.686.000 | 8.749.000  |
| 108 | BANJARMASIN | DENPASAR     | 8.792.000  | 4.920.000  |
| 109 | BANJARMASIN | JAYAPURA     | 17.135.000 | 9.359.000  |
| 110 | BANJARMASIN | JOGYAKARTA   | 7.723.000  | 4.022.000  |
| 111 | BANJARMASIN | MEDAN        | 10.546.000 | 5.412.000  |
| 112 | BANJARMASIN | PADANG       | 9.006.000  | 4.642.000  |
| 113 | BANJARMASIN | PALEMBANG    | 7.498.000  | 4.022.000  |
| 114 | BANJARMASIN | PEKANBARU    | 9.049.000  | 4.696.000  |
| 115 | BANJARMASIN | SEMARANG     | 7.498.000  | 3.958.000  |
| 116 | BANJARMASIN | SOLO         | 7.498.000  | 4.097.000  |
| 117 | BANJARMASIN | SURABAYA     | 8.942.000  | 4.385.000  |
| 118 | BANJARMASIN | TIMIKA       | 16.472.000 | 8.717.000  |
| 119 | BATAM       | BANDA ACEH   | 10.439.000 | 5.936.000  |
| 120 | BATAM       | DENPASAR     | 8.450.000  | 4.824.000  |
| 121 | BATAM       | JAYAPURA     | 16.782.000 | 9.263.000  |
| 122 | BATAM       | JOGYAKARTA   | 7.370.000  | 3.936.000  |
| 123 | BATAM       | MAKASAR      | 10.375.000 | 5.337.000  |
| 124 | BATAM       | MANADO       | 13.413.000 | 6.482.000  |
| 125 | BATAM       | MEDAN        | 10.193.000 | 5.316.000  |
| 126 | BATAM       | PADANG       | 8.653.000  | 4.546.000  |
| 127 | BATAM       | PALEMBANG    | 7.145.000  | 3.936.000  |
| 128 | BATAM       | PEKANBARU    | 8.707.000  | 4.599.000  |
| 129 | BATAM       | PONTIANAK    | 7.594.000  | 4.396.000  |
| 130 | BATAM       | SEMARANG     | 7.145.000  | 3.861.000  |
| 131 | BATAM       | SOLO         | 7.145.000  | 4.000.000  |
| 132 | BATAM       | SURABAYA     | 8.600.000  | 4.300.000  |
| 133 | BATAM       | TIMIKA       | 16.119.000 | 8.621.000  |
| 134 | BENGGKULU   | PALEMBANG    | 2.899.000  | 1.893.000  |
| 135 | BIAK        | BALIKPAPAN   | 18.622.000 | 9.477.000  |
| 136 | BIAK        | BANDA ACEH   | 18.718.000 | 10.108.000 |
| 137 | BIAK        | BATAM        | 16.333.000 | 8.664.000  |
| 138 | BIAK        | DENPASAR     | 16.729.000 | 8.995.000  |
| 139 | BIAK        | JAYAPURA     | 3.615.000  | 2.321.000  |
| 140 | BIAK        | JOGJAKARTA   | 15.648.000 | 8.108.000  |
| 141 | BIAK        | MANADO       | 11.734.000 | 6.353.000  |
| 142 | BIAK        | MEDAN        | 18.472.000 | 9.498.000  |
| 143 | BIAK        | PADANG       | 16.932.000 | 8.728.000  |
| 144 | BIAK        | PALEMBANG    | 15.424.000 | 8.108.000  |
| 145 | BIAK        | PEKANBARU    | 16.985.000 | 8.381.000  |
| 146 | BIAK        | PONTIANAK    | 15.873.000 | 8.568.000  |
| 147 | BIAK        | SURABAYA     | 12.782.000 | 7.081.000  |
| 148 | BIAK        | TIMIKA       | 5.808.000  | 3.444.000  |
| 149 | DENPASAR    | JAYAPURA     | 11.680.000 | 6.845.000  |
| 150 | DENPASAR    | KUPANG       | 5.091.000  | 2.952.000  |
| 151 | DENPASAR    | MAKASSAR     | 4.182.000  | 2.631.000  |
| 152 | DENPASAR    | MANADO       | 7.851.000  | 4.278.000  |
| 153 | DENPASAR    | MATARAM      | 1.840.000  | 1.390.000  |
| 154 | DENPASAR    | MEDAN        | 10.589.000 | 5.658.000  |
| 155 | DENPASAR    | PADANG       | 9.049.000  | 4.888.000  |
| 156 | DENPASAR    | PALANGKARAYA | 8.557.000  | 4.909.000  |
| 157 | DENPASAR    | PALEMBANG    | 7.541.000  | 4.278.000  |
| 158 | DENPASAR    | PEKANBARU    | 9.092.000  | 4.942.000  |
| 159 | DENPASAR    | PONTIANAK    | 7.990.000  | 4.738.000  |
| 160 | DENPASAR    | TIMIKA       | 10.140.000 | 6.129.000  |
| 161 | JAMBI       | BALIKPAPAN   | 7.733.000  | 4.407.000  |
| 162 | JAMBI       | BANJARMASIN  | 7.690.000  | 4.193.000  |

|     |            |              |            |            |
|-----|------------|--------------|------------|------------|
| 163 | JAMBI      | DENPASAR     | 7.733.000  | 4.439.000  |
| 164 | JAMBI      | JOGJAKARTA   | 6.653.000  | 3.551.000  |
| 165 | JAMBI      | KUPANG       | 11.434.000 | 6.075.000  |
| 166 | JAMBI      | MAKASSAR     | 9.659.000  | 4.952.000  |
| 167 | JAMBI      | MALANG       | 7.091.000  | 3.925.000  |
| 168 | JAMBI      | MANADO       | 12.707.000 | 6.097.000  |
| 169 | JAMBI      | PALANGKARAYA | 7.444.000  | 4.193.000  |
| 170 | JAMBI      | PONTIANAK    | 6.878.000  | 4.011.000  |
| 171 | JAMBI      | SEMARANG     | 6.428.000  | 3.476.000  |
| 172 | JAMBI      | SOLO         | 6.428.000  | 3.615.000  |
| 173 | JAMBI      | SURABAYA     | 7.883.000  | 3.915.000  |
| 174 | JAYAPURA   | JOGJAKARTA   | 13.274.000 | 7.690.000  |
| 175 | JAYAPURA   | MANADO       | 22.109.000 | 11.263.000 |
| 176 | JAYAPURA   | MEDAN        | 18.932.000 | 10.097.000 |
| 177 | JAYAPURA   | PADANG       | 17.381.000 | 9.327.000  |
| 178 | JAYAPURA   | PALEMBANG    | 15.873.000 | 8.717.000  |
| 179 | JAYAPURA   | PEKANBARU    | 17.435.000 | 9.380.000  |
| 180 | JAYAPURA   | PONTIANAK    | 16.322.000 | 9.177.000  |
| 181 | JAYAPURA   | TIMIKA       | 3.615.000  | 2.289.000  |
| 182 | YOGJAKARTA | DENPASAR     | 3.861.000  | 2.481.000  |
| 183 | YOGJAKARTA | MAKASAR      | 6.525.000  | 3.893.000  |
| 184 | YOGJAKARTA | MANADO       | 10.536.000 | 5.722.000  |
| 185 | YOGJAKARTA | MEDAN        | 9.519.000  | 4.770.000  |
| 186 | YOGJAKARTA | PADANG       | 7.969.000  | 4.000.000  |
| 187 | YOGJAKARTA | PALEMBANG    | 6.460.000  | 3.380.000  |
| 188 | YOGJAKARTA | PEKANBARU    | 8.022.000  | 4.054.000  |
| 189 | YOGJAKARTA | PONTIANAK    | 6.910.000  | 3.840.000  |
| 190 | YOGJAKARTA | TIMIKA       | 11.894.000 | 7.038.000  |
| 191 | KENDARI    | BANDA ACEH   | 12.953.000 | 7.102.000  |
| 192 | KENDARI    | BATAM        | 10.568.000 | 5.658.000  |
| 193 | KENDARI    | DENPASAR     | 5.455.000  | 3.273.000  |
| 194 | KENDARI    | YOGJAKARTA   | 8.129.000  | 4.706.000  |
| 195 | KENDARI    | PADANG       | 11.167.000 | 5.722.000  |
| 196 | KENDARI    | PALEMBANG    | 9.659.000  | 5.102.000  |
| 197 | KENDARI    | PEKANBARU    | 11.220.000 | 5.776.000  |
| 198 | KENDARI    | SEMARANG     | 9.659.000  | 5.027.000  |
| 199 | KENDARI    | SOLO         | 9.659.000  | 5.166.000  |
| 200 | KENDARI    | SURABAYA     | 11.103.000 | 5.466.000  |
| 201 | KENDARI    | TIMIKA       | 18.633.000 | 9.798.000  |
| 202 | KUPANG     | JAYAPURA     | 14.386.000 | 8.108.000  |
| 203 | KUPANG     | YOGJAKARTA   | 7.348.000  | 4.182.000  |
| 204 | KUPANG     | MAKASSAR     | 7.637.000  | 4.311.000  |
| 205 | KUPANG     | MANADO       | 11.648.000 | 6.140.000  |
| 206 | KUPANG     | SURABAYA     | 6.749.000  | 3.722.000  |
| 207 | MAKASSAR   | BIAK         | 8.493.000  | 4.931.000  |
| 208 | MAKASSAR   | JAYAPURA     | 10.193.000 | 5.787.000  |
| 209 | MAKASSAR   | KENDARI      | 2.663.000  | 1.786.000  |
| 210 | MAKASSAR   | MANADO       | 5.327.000  | 2.909.000  |
| 211 | MAKASSAR   | TIMIKA       | 11.723.000 | 6.567.000  |
| 212 | MALANG     | BALIKPAPAN   | 10.108.000 | 5.134.000  |
| 213 | MALANG     | BANDA ACEH   | 10.204.000 | 5.765.000  |
| 214 | MALANG     | BANJARMASIN  | 8.161.000  | 4.407.000  |
| 215 | MALANG     | BATAM        | 7.819.000  | 4.311.000  |
| 216 | MALANG     | BIAK         | 16.087.000 | 8.482.000  |
| 217 | MALANG     | JAYAPURA     | 16.536.000 | 9.092.000  |
| 218 | MALANG     | KENDARI      | 10.322.000 | 5.487.000  |

|     |              |              |            |           |
|-----|--------------|--------------|------------|-----------|
| 219 | MALANG       | MAKASSAR     | 10.129.000 | 5.166.000 |
| 220 | MALANG       | MANADO       | 13.167.000 | 6.311.000 |
| 221 | MALANG       | MEDAN        | 9.958.000  | 5.145.000 |
| 222 | MALANG       | PADANG       | 8.418.000  | 4.385.000 |
| 223 | MALANG       | PALANGKARAYA | 7.915.000  | 4.407.000 |
| 224 | MALANG       | PALEMBANG    | 6.899.000  | 3.765.000 |
| 225 | MALANG       | PEKANBARU    | 8.461.000  | 4.439.000 |
| 226 | MALANG       | TIMIKA       | 15.873.000 | 8.461.000 |
| 227 | MANADO       | MEDAN        | 15.552.000 | 7.316.000 |
| 228 | MANADO       | PADANG       | 14.012.000 | 6.546.000 |
| 229 | MANADO       | PALEMBANG    | 12.504.000 | 5.926.000 |
| 230 | MANADO       | PEKANBARU    | 14.055.000 | 6.599.000 |
| 231 | MANADO       | PONTIANAK    | 12.953.000 | 6.396.000 |
| 232 | MANADO       | SEMARANG     | 12.504.000 | 5.851.000 |
| 233 | MANADO       | SOLO         | 12.504.000 | 5.990.000 |
| 234 | MANADO       | SURABAYA     | 9.937.000  | 5.262.000 |
| 235 | MANADO       | TIMIKA       | 16.183.000 | 8.995.000 |
| 236 | MATARAM      | BALIKPAPAN   | 10.750.000 | 5.615.000 |
| 237 | MATARAM      | BANDA ACEH   | 10.846.000 | 6.246.000 |
| 238 | MATARAM      | BANJARMASIN  | 8.803.000  | 4.888.000 |
| 239 | MATARAM      | BATAM        | 8.461.000  | 4.803.000 |
| 240 | MATARAM      | BIAK         | 11.522.000 | 6.546.000 |
| 241 | MATARAM      | JAYAPURA     | 13.092.000 | 7.327.000 |
| 242 | MATARAM      | YOGJAKARTA   | 4.417.000  | 2.781.000 |
| 243 | MATARAM      | MAKASSAR     | 4.717.000  | 2.909.000 |
| 244 | MATARAM      | MANADO       | 8.717.000  | 4.738.000 |
| 245 | MATARAM      | MEDAN        | 10.600.000 | 5.637.000 |
| 246 | MATARAM      | PADANG       | 9.060.000  | 4.867.000 |
| 247 | MATARAM      | PALEMBANG    | 7.551.000  | 4.246.000 |
| 248 | MATARAM      | PEKANBARU    | 9.102.000  | 4.909.000 |
| 249 | MATARAM      | PONTIANAK    | 8.001.000  | 4.706.000 |
| 250 | MATARAM      | SURABAYA     | 3.829.000  | 2.321.000 |
| 251 | MEDAN        | BANDA ACEH   | 3.466.000  | 2.193.000 |
| 252 | MEDAN        | MAKASSAR     | 12.514.000 | 6.172.000 |
| 253 | MEDAN        | PONTIANAK    | 9.733.000  | 5.230.000 |
| 254 | MEDAN        | SEMARANG     | 9.284.000  | 4.696.000 |
| 255 | MEDAN        | SOLO         | 9.284.000  | 4.835.000 |
| 256 | MEDAN        | SURABAYA     | 10.739.000 | 5.134.000 |
| 257 | MEDAN        | TIMIKA       | 18.258.000 | 9.455.000 |
| 258 | PADANG       | MAKASSAR     | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 259 | PADANG       | PONTIANAK    | 8.193.000  | 4.460.000 |
| 260 | PADANG       | SEMARANG     | 7.744.000  | 3.925.000 |
| 261 | PADANG       | SOLO         | 7.744.000  | 4.065.000 |
| 262 | PADANG       | SURABAYA     | 9.199.000  | 4.364.000 |
| 263 | PADANG       | TIMIKA       | 16.718.000 | 8.685.000 |
| 264 | PALANGKARAYA | BANDA ACEH   | 10.546.000 | 6.022.000 |
| 265 | PALANGKARAYA | BATAM        | 8.161.000  | 4.578.000 |
| 266 | PALANGKARAYA | YOGJAKARTA   | 7.477.000  | 4.022.000 |
| 267 | PALANGKARAYA | MATARAM      | 8.557.000  | 4.888.000 |
| 268 | PALANGKARAYA | MEDAN        | 10.300.000 | 5.412.000 |
| 269 | PALANGKARAYA | PADANG       | 8.760.000  | 4.642.000 |
| 270 | PALANGKARAYA | PALEMBANG    | 7.252.000  | 4.022.000 |
| 271 | PALANGKARAYA | PEKANBARU    | 8.803.000  | 4.696.000 |
| 272 | PALANGKARAYA | SEMARANG     | 7.252.000  | 3.947.000 |
| 273 | PALANGKARAYA | SOLO         | 7.252.000  | 4.086.000 |
| 274 | PALANGKARAYA | SURABAYA     | 8.696.000  | 4.385.000 |

|     |                |             |            |           |
|-----|----------------|-------------|------------|-----------|
| 275 | PALEMBANG      | BALIKPAPAN  | 9.894.000  | 5.220.000 |
| 276 | PALEMBANG      | MAKASSAR    | 9.466.000  | 4.781.000 |
| 277 | PALEMBANG      | PONTIANAK   | 6.685.000  | 3.840.000 |
| 278 | PALEMBANG      | SEMARANG    | 6.236.000  | 3.305.000 |
| 279 | PALEMBANG      | SOLO        | 6.236.000  | 3.444.000 |
| 280 | PALEMBANG      | SURABAYA    | 7.690.000  | 3.744.000 |
| 281 | PALEMBANG      | TIMIKA      | 15.210.000 | 8.076.000 |
| 282 | PALU           | MAKASSAR    | 4.268.000  | 2.578.000 |
| 283 | PALU           | POSO        | 1.957.000  | 1.423.000 |
| 284 | PALU           | SORONG      | 6.878.000  | 3.883.000 |
| 285 | PALU           | SURABAYA    | 6.878.000  | 3.883.000 |
| 286 | PALU           | TOLI TOLI   | 2.941.000  | 1.915.000 |
| 287 | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN  | 9.038.000  | 4.631.000 |
| 288 | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | 7.091.000  | 3.915.000 |
| 289 | PANGKAL PINANG | BATAM       | 6.739.000  | 3.818.000 |
| 290 | PANGKAL PINANG | YOGJAKARTA  | 6.065.000  | 3.262.000 |
| 291 | PANGKAL PINANG | MAKASSAR    | 9.060.000  | 4.663.000 |
| 292 | PANGKAL PINANG | MANADO      | 12.097.000 | 5.808.000 |
| 293 | PANGKAL PINANG | MEDAN       | 8.888.000  | 4.653.000 |
| 294 | PANGKAL PINANG | PADANG      | 7.337.000  | 3.883.000 |
| 295 | PANGKAL PINANG | PALEMBANG   | 5.829.000  | 3.262.000 |
| 296 | PANGKAL PINANG | PEKANBARU   | 7.391.000  | 3.936.000 |
| 297 | PANGKAL PINANG | PONTIANAK   | 6.279.000  | 3.733.000 |
| 298 | PANGKAL PINANG | SEMARANG    | 5.829.000  | 3.187.000 |
| 299 | PANGKAL PINANG | SOLO        | 5.829.000  | 3.326.000 |
| 300 | PANGKAL PINANG | SURABAYA    | 7.284.000  | 3.626.000 |
| 301 | PEKANBARU      | PONTIANAK   | 8.247.000  | 4.514.000 |
| 302 | PEKANBARU      | SEMARANG    | 7.797.000  | 3.979.000 |
| 303 | PEKANBARU      | SOLO        | 7.797.000  | 4.118.000 |
| 304 | PEKANBARU      | SURABAYA    | 9.241.000  | 4.407.000 |
| 305 | PEKANBARU      | TIMIKA      | 16.771.000 | 8.739.000 |
| 306 | PONTIANAK      | MAKASSAR    | 9.915.000  | 5.241.000 |
| 307 | PONTIANAK      | SEMARANG    | 6.685.000  | 3.765.000 |
| 308 | PONTIANAK      | SOLO        | 6.685.000  | 3.904.000 |
| 309 | PONTIANAK      | SURABAYA    | 8.140.000  | 4.204.000 |
| 310 | PONTIANAK      | TIMIKA      | 15.659.000 | 8.535.000 |
| 311 | SEMARANG       | MAKASSAR    | 9.466.000  | 4.706.000 |
| 312 | SOLO           | MAKASSAR    | 9.466.000  | 4.845.000 |
| 313 | SURABAYA       | DENPASAR    | 3.198.000  | 1.979.000 |
| 314 | SURABAYA       | JAYAPURA    | 12.675.000 | 7.231.000 |
| 315 | SURABAYA       | MAKASSAR    | 5.936.000  | 3.433.000 |
| 316 | SURABAYA       | TIMIKA      | 11.295.000 | 6.589.000 |

## C. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | TEMPAT TUJUAN       | BIAYA TAKSI |         |
|----|---------------------|-------------|---------|
|    |                     | SATUAN      | BIAYA   |
| 1  | 2                   | 3           | 4       |
| 1  | ACEH                | Orang/Kali  | 127.000 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali  | 308.000 |
| 3  | RIAU                | Orang/Kali  | 101.000 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali  | 165.000 |
| 5  | JAMBI               | Orang/Kali  | 147.000 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali  | 190.000 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali  | 179.000 |
| 8  | LAMPUNG             | Orang/Kali  | 168.000 |
| 9  | BENGKULU            | Orang/Kali  | 109.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali  | 97.000  |
| 11 | BANTEN              | Orang/Kali  | 536.000 |
| 12 | JAWA BARAT          | Orang/Kali  | 200.000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA      | Orang/Kali  | 256.000 |
| 14 | JAWA TENGAH         | Orang/Kali  | 108.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali  | 267.000 |
| 16 | JAWA TIMUR          | Orang/Kali  | 233.000 |
| 17 | BALI                | Orang/Kali  | 227.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali  | 231.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali  | 116.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali  | 171.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali  | 134.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali  | 180.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali  | 533.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali  | 218.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali  | 138.000 |
| 26 | GORONTALO           | Orang/Kali  | 265.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali  | 313.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali  | 187.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali  | 165.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali  | 171.000 |
| 31 | MALUKU              | Orang/Kali  | 288.000 |
| 32 | MALUKU UTARA        | Orang/Kali  | 215.000 |
| 33 | PAPUA               | Orang/Kali  | 513.000 |
| 34 | PAPUA BARAT         | Orang/Kali  | 236.000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA    | Orang/Kali  | 236.000 |
| 36 | PAPUA TENGAH        | Orang/Kali  | 513.000 |
| 37 | PAPUA SELATAN       | Orang/Kali  | 513.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN    | Orang/Kali  | 513.000 |

D. PENGHITUNGAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TUJUAN DALAM PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Dalam Provinsi Jawa Timur

**Jarak Antar Kota  
( Km)**

|             | Surabaya | Gresik | Sidoarjo | Mojokerto | Jombang | Bojonegoro | Lamongan | Tuban | Madiun | Ngawi | Magetan | Ponorogo | Pacitan | Kediri | Nganjuk | Tulungagung | Blitar | Trenggalek | Malang | Pasuruan | Probolinggo | Lumajang | Bondowoso | Situbondo | Jember | Banyuwangi | Bangkalan | Sampang | Pamekasan | Sumenep |
|-------------|----------|--------|----------|-----------|---------|------------|----------|-------|--------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|-------------|--------|------------|--------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Surabaya    | 0        | 18     | 23       | 49        | 79      | 108        | 45       | 103   | 169    | 181   | 193     | 198      | 276     | 123    | 119     | 154         | 167    | 186        | 89     | 60       | 99          | 145      | 191       | 194       | 197    | 288        | 28        | 90      | 123       | 175     |
| Gresik      | 18       | 0      | 41       | 67        | 97      | 90         | 27       | 85    | 187    | 199   | 211     | 216      | 294     | 141    | 137     | 172         | 185    | 204        | 107    | 78       | 117         | 163      | 209       | 212       | 215    | 306        | 46        | 108     | 141       | 193     |
| Sidoarjo    | 23       | 41     | 0        | 72        | 102     | 131        | 68       | 126   | 192    | 204   | 216     | 221      | 298     | 145    | 142     | 177         | 144    | 208        | 66     | 37       | 76          | 122      | 168       | 171       | 174    | 265        | 51        | 113     | 146       | 198     |
| Mojokerto   | 49       | 67     | 72       | 0         | 30      | 115        | 57       | 110   | 120    | 132   | 144     | 149      | 227     | 74     | 70      | 105         | 118    | 137        | 86     | 61       | 100         | 146      | 192       | 195       | 198    | 289        | 77        | 139     | 172       | 224     |
| Jombang     | 79       | 97     | 102      | 30        | 0       | 85         | 80       | 81    | 90     | 102   | 114     | 119      | 197     | 44     | 40      | 75          | 88     | 107        | 119    | 91       | 130         | 176      | 222       | 225       | 228    | 319        | 107       | 169     | 202       | 254     |
| Bojonegoro  | 108      | 90     | 131      | 115       | 85      | 0          | 63       | 65    | 110    | 78    | 112     | 139      | 217     | 129    | 125     | 160         | 173    | 192        | 197    | 168      | 207         | 253      | 298       | 202       | 305    | 396        | 136       | 198     | 231       | 283     |
| Lamongan    | 45       | 27     | 68       | 57        | 80      | 63         | 0        | 58    | 177    | 187   | 201     | 206      | 284     | 131    | 127     | 162         | 175    | 194        | 134    | 105      | 144         | 190      | 236       | 239       | 242    | 333        | 73        | 135     | 168       | 220     |
| Tuban       | 103      | 95     | 126      | 110       | 82      | 65         | 58       | 0     | 172    | 184   | 196     | 201      | 279     | 126    | 122     | 157         | 170    | 189        | 191    | 163      | 202         | 248      | 284       | 297       | 300    | 391        | 131       | 193     | 226       | 278     |
| Madiun      | 169      | 187    | 192      | 128       | 90      | 110        | 177      | 182   | 0      | 32    | 24      | 29       | 107     | 78     | 50      | 109         | 122    | 82         | 178    | 181      | 220         | 266      | 312       | 315       | 338    | 407        | 127       | 259     | 292       | 344     |
| Ngawi       | 181      | 199    | 264      | 132       | 102     | 78         | 189      | 184   | 32     | 0     | 34      | 61       | 139     | 90     | 62      | 121         | 134    | 114        | 190    | 193      | 232         | 278      | 324       | 327       | 330    | 42         | 409       | 271     | 304       | 356     |
| Magetan     | 193      | 211    | 216      | 144       | 114     | 113        | 201      | 190   | 24     | 34    | 0       | 53       | 131     | 102    | 74      | 133         | 146    | 106        | 202    | 205      | 244         | 290      | 336       | 339       | 342    | 433        | 221       | 383     | 316       | 368     |
| Ponorogo    | 198      | 216    | 221      | 148       | 119     | 139        | 206      | 201   | 29     | 61    | 53      | 0        | 78      | 115    | 79      | 84          | 117    | 52         | 195    | 210      | 249         | 211      | 341       | 344       | 347    | 438        | 226       | 283     | 321       | 373     |
| Pacitan     | 276      | 294    | 298      | 227       | 197     | 217        | 284      | 179   | 107    | 139   | 131     | 78       | 0       | 180    | 157     | 149         | 182    | 117        | 270    | 213      | 352         | 276      | 390       | 421       | 358    | 462        | 364       | 366     | 399       | 451     |
| Kediri      | 123      | 141    | 146      | 47        | 44      | 129        | 131      | 126   | 78     | 90    | 102     | 115      | 180     | 0      | 28      | 31          | 44     | 63         | 100    | 156      | 194         | 217      | 386       | 289       | 299    | 383        | 151       | 213     | 246       | 296     |
| Nganjuk     | 119      | 137    | 142      | 70        | 40      | 125        | 127      | 122   | 50     | 62    | 74      | 79       | 157     | 28     | 0       | 59          | 72     | 96         | 128    | 131      | 170         | 216      | 282       | 285       | 268    | 359        | 147       | 209     | 242       | 294     |
| Tulungagung | 154      | 172    | 177      | 105       | 75      | 160        | 162      | 157   | 109    | 121   | 132     | 84       | 149     | 31     | 59      | 0           | 33     | 32         | 111    | 66       | 205         | 205      | 297       | 300       | 303    | 394        | 182       | 244     | 277       | 329     |
| Blitar      | 167      | 185    | 144      | 118       | 86      | 173        | 175      | 170   | 122    | 134   | 146     | 117      | 182     | 44     | 72      | 33          | 0      | 64         | 78     | 133      | 172         | 172      | 264       | 267       | 270    | 361        | 195       | 257     | 290       | 342     |
| Trenggalek  | 196      | 204    | 206      | 137       | 107     | 192        | 194      | 189   | 82     | 144   | 106     | 52       | 117     | 63     | 90      | 32          | 64     | 0          | 142    | 197      | 236         | 236      | 328       | 331       | 334    | 425        | 214       | 276     | 359       | 361     |
| Malang      | 89       | 107    | 66       | 89        | 119     | 197        | 134      | 192   | 178    | 190   | 202     | 195      | 290     | 100    | 26      | 111         | 78     | 142        | 0      | 55       | 94          | 117      | 194       | 189       | 192    | 259        | 117       | 179     | 212       | 264     |
| Pasuruan    | 60       | 78     | 37       | 61        | 91      | 168        | 105      | 163   | 181    | 193   | 205     | 210      | 313     | 155    | 131     | 166         | 133    | 197        | 55     | 0        | 39          | 85       | 131       | 134       | 137    | 228        | 86        | 150     | 183       | 235     |
| Probolinggo | 90       | 117    | 76       | 100       | 130     | 207        | 144      | 202   | 220    | 132   | 244     | 240      | 352     | 194    | 170     | 205         | 172    | 236        | 94     | 39       | 0           | 46       | 92        | 95        | 96     | 189        | 127       | 189     | 222       | 274     |
| Lumajang    | 145      | 163    | 122      | 149       | 176     | 253        | 190      | 248   | 266    | 276   | 290     | 221      | 276     | 217    | 216     | 205         | 172    | 236        | 117    | 85       | 46          | 0        | 105       | 140       | 172    | 177        | 173       | 235     | 268       | 320     |
| Bondowoso   | 191      | 209    | 168      | 192       | 222     | 299        | 236      | 294   | 312    | 324   | 336     | 341      | 390     | 386    | 362     | 297         | 264    | 328        | 186    | 131      | 92          | 105      | 0         | 35        | 32     | 126        | 219       | 281     | 314       | 396     |
| Situbondo   | 194      | 212    | 171      | 195       | 225     | 302        | 239      | 297   | 345    | 327   | 339     | 344      | 421     | 289    | 208     | 300         | 267    | 331        | 167    | 134      | 95          | 140      | 35        | 0         | 67     | 94         | 222       | 284     | 317       | 389     |
| Jember      | 197      | 215    | 174      | 196       | 228     | 305        | 242      | 300   | 318    | 330   | 342     | 347      | 358     | 292    | 268     | 303         | 270    | 334        | 192    | 137      | 96          | 72       | 32        | 97        | 0      | 105        | 225       | 287     | 320       | 372     |
| Banyuwangi  | 288      | 306    | 265      | 289       | 319     | 396        | 333      | 391   | 407    | 421   | 433     | 436      | 462     | 383    | 389     | 394         | 361    | 425        | 239    | 228      | 189         | 177      | 136       | 94        | 105    | 0          | 316       | 378     | 411       | 463     |
| Bangkalan   | 28       | 46     | 51       | 77        | 107     | 136        | 73       | 131   | 197    | 209   | 221     | 226      | 304     | 151    | 147     | 182         | 195    | 214        | 117    | 86       | 127         | 173      | 219       | 222       | 225    | 316        | 0         | 62      | 96        | 147     |
| Sampang     | 90       | 108    | 113      | 139       | 169     | 196        | 135      | 193   | 259    | 271   | 283     | 288      | 366     | 213    | 209     | 144         | 257    | 276        | 179    | 150      | 189         | 235      | 281       | 294       | 287    | 375        | 62        | 0       | 33        | 85      |
| Pamekasan   | 123      | 141    | 145      | 172       | 202     | 231        | 168      | 226   | 292    | 304   | 316     | 321      | 399     | 246    | 242     | 277         | 290    | 309        | 212    | 183      | 222         | 268      | 314       | 317       | 320    | 411        | 95        | 33      | 0         | 52      |
| Sumenep     | 175      | 193    | 196      | 224       | 254     | 283        | 220      | 278   | 344    | 356   | 368     | 373      | 451     | 286    | 294     | 329         | 342    | 361        | 264    | 235      | 274         | 320      | 396       | 369       | 372    | 463        | 147       | 85      | 52        | 0       |

Ketentuan penghitungan :

- a. Untuk jarak total adalah jarak tersebut dalam tabel dikalikan 2 (dua).
  - b. Rumus penghitungan Jarak Total dibagi 8 dikali harga BBM.
  - c. Pembagian 8 diperoleh dari rata-rata konsumsi BBM 1 liter per 8 km
  - d. Harga BBM adalah harga Pertamina/sejenisnya.
2. Penghitungan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Lokasi Tujuan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Penghitungan :
- a. Untuk jarak total adalah jarak tersebut dalam tabel dikalikan 2 (dua).
  - b. Rumus penghitungan Jarak Total dibagi 8 dikali harga BBM.
  - c. Pembagian 8 diperoleh dari rata-rata konsumsi BBM 1 liter per 8 km
  - d. Harga BBM adalah harga Pertamina/sejenisnya.
  - e. Penentuan jarak dapat menggunakan aplikasi berbasis Web yang menyediakan layanan penghitung jarak.

Pj. BUPATI MADIUN,

tttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO  | PROVINSI            | SATUAN | TARIF HOTEL  |                                    |  |  |
|-----|---------------------|--------|--|------------------------------------|--|--|
|     |                     |        | KEPALA DAERAH/<br>PIMPINAN DPRD/<br>PEJABAT ESELON I | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan /PNS Gol IV | PEJABAT ESELON IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan/ PNS Gol III, II dan I/ PPPK Gol V, VII, IX dan X |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp4.420.000  | Rp3.526.000                        | Rp1.533.000  | Rp770.000  |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp4.960.000  | Rp2.195.000                        | Rp1.100.000  | Rp699.000  |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp3.820.000  | Rp3.119.000                        | Rp1.650.000  | Rp852.000  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp5.344.000  | Rp2.318.000                        | Rp1.297.000  | Rp792.000  |
| 5.  | JAMBI               | OH     | Rp5.000.000  | Rp4.102.000                        | Rp1.225.000  | Rp580.000  |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp5.236.000  | Rp3.332.000                        | Rp1.353.000  | Rp701.000  |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp5.850.000  | Rp3.083.000                        | Rp1.955.000  | Rp861.000  |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp4.491.000  | Rp2.488.000                        | Rp1.425.000  | Rp580.000  |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp2.140.000  | Rp1.628.000                        | Rp1.546.000  | Rp692.000  |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp3.827.000  | Rp2.838.000                        | Rp1.957.000  | Rp649.000  |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp5.725.000  | Rp2.373.000                        | Rp1.204.000  | Rp724.000  |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp5.381.000  | Rp2.755.000                        | Rp1.201.000  | Rp686.000  |
| 13. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | Rp8.720.000  | Rp2.063.000                        | Rp992.000  | Rp730.000  |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp5.303.000  | Rp1.850.000                        | Rp1.201.000  | Rp750.000  |
| 15. | YOGYAKARTA          | OH     | Rp5.017.000  | Rp2.695.000                        | Rp1.384.000  | Rp845.000  |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp4.449.000  | Rp2.007.000                        | Rp1.153.000  | Rp814.000  |
| 17. | BALI                | OH     | Rp6.848.000  | Rp2.433.000                        | Rp1.685.000  | Rp1.138.000  |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp4.375.000  | Rp2.648.000                        | Rp1.418.000  | Rp907.000  |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp3.750.000  | Rp2.133.000                        | Rp1.355.000  | Rp688.000  |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp2.654.000  | Rp1.923.000                        | Rp1.125.000  | Rp538.000  |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp4.901.000  | Rp3.391.000                        | Rp1.160.000  | Rp659.000  |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp4.797.000  | Rp3.316.000                        | Rp1.500.000  | Rp697.000  |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp4.000.000  | Rp2.188.000                        | Rp1.507.000  | Rp804.000  |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp4.000.000  | Rp2.735.000                        | Rp1.507.000  | Rp904.000  |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp4.919.000  | Rp2.290.000                        | Rp1.207.000  | Rp978.000  |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp4.168.000  | Rp3.107.000                        | Rp1.606.000  | Rp955.000  |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp4.076.000  | Rp3.098.000                        | Rp1.344.000  | Rp704.000  |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp4.820.000  | Rp1.938.000                        | Rp1.423.000  | Rp745.000  |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp2.309.000  | Rp2.027.000                        | Rp1.679.000  | Rp951.000  |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp3.088.800  | Rp2.574.000                        | Rp1.297.000  | Rp786.000  |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp3.467.000  | Rp3.240.000                        | Rp1.059.000  | Rp667.000  |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp4.611.600  | Rp3.843.000                        | Rp1.160.000  | Rp605.000  |



|     |                  |    |             |             |             |             |
|-----|------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33. | PAPUA            | OH | Rp3.859.000 | Rp3.318.000 | Rp2.521.000 | Rp1.038.000 |
| 34. | PAPUA BARAT      | OH | Rp3.872.000 | Rp3.341.000 | Rp2.056.000 | Rp967.000   |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OH | Rp3.872.000 | Rp3.341.000 | Rp2.056.000 | Rp967.000   |
| 36. | PAPUA TENGAH     | OH | Rp3.859.000 | Rp3.318.000 | Rp2.521.000 | Rp1.038.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN    | OH | Rp5.673.000 | Rp4.877.000 | Rp3.706.000 | Rp1.526.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | Rp5.711.000 | Rp4.911.000 | Rp3.731.000 | Rp1.536.000 |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI MADIUN NOMOR 57 TAHUN  
2022 TENTANG STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

Nomor : .....

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor: .....

Tanggal : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (*Nama yang melaksanakan SPT*)  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

dalam kegiatan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tersebut di atas, saya telah mengikuti kegiatan sampai dengan selesai dan tidak melaksanakan aktifitas menginap di hotel/penginapan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun , .....

Yang membuat Pernyataan,

.....  
NIP. ....

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. EKSEKUTIF

| NO | JABATAN                           | SATUAN | UANG REPRESENTASI<br>DALAM DAERAH* | UANG REPRESENTASI<br>LUAR DAERAH |
|----|-----------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Bupati                            | OH     | Rp125.000                          | Rp250.000                        |
| 2  | Wakil Bupati                      | OH     | Rp110.000                          | Rp225.000                        |
| 3  | Sekretaris Daerah/<br>Eselon II a | OH     | Rp75.000                           | Rp150.000                        |
| 4  | Pejabat Eselon II b               | OH     | Rp65.000                           | Rp150.000                        |

B. LEGISLATIF

| NO | JABATAN          | SATUAN | UANG REPRESENTASI<br>DALAM DAERAH* | UANG REPRESENTASI<br>LUAR DAERAH |
|----|------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Ketua DPRD       | OH     | Rp125.000                          | Rp250.000                        |
| 2  | Wakil Ketua DPRD | OH     | Rp110.000                          | Rp225.000                        |
| 3  | Anggota DPRD     | OH     | Rp75.000                           | Rp200.000                        |

\* Uang Representasi diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 151 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH  
 DALAM RANGKA BIMTEK DAN DIKLAT

| NO | TEMPAT TUJUAN       | SATUAN     | BESARAN BIAYA (Rp) |
|----|---------------------|------------|--------------------|
| 1  | 2                   | 3          | 4                  |
| 1  | ACEH                | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 2  | SUMATERA UTARA      | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 3  | RIAU                | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 5  | JAMBI               | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 6  | SUMATERA BARAT      | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 8  | LAMPUNG             | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 9  | BENGKULU            | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | Orang/hari | Rp.120.000         |
| 11 | BANTEN              | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 12 | JAWA BARAT          | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 13 | DKI JAKARTA         | Orang/hari | Rp.160.000         |
| 14 | JAWA TENGAH         | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 15 | DI YOGYAKARTA       | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 16 | JAWA TIMUR          | Orang/hari | Rp.120.000         |
| 17 | BALI                | Orang/hari | Rp.140.000         |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 25 | SULAWESI UTARA      | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 26 | GORONTALO           | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 27 | SULAWESI BARAT      | Orang/hari | Rp.120.000         |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 31 | MALUKU              | Orang/hari | Rp.110.000         |
| 32 | MALUKU UTARA        | Orang/hari | Rp.130.000         |
| 33 | PAPUA               | Orang/hari | Rp.170.000         |
| 34 | PAPUA BARAT         | Orang/hari | Rp.140.000         |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA    | Orang/hari | Rp.140.000         |
| 36 | PAPUA TENGAH        | Orang/hari | Rp.170.000         |

|    |                  |            |            |
|----|------------------|------------|------------|
| 37 | PAPUA SELATAN    | Orang/hari | Rp.170.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/hari | Rp.170.000 |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BIAYA PEMETIAN JENAZAH

(dalam rupiah)

| NO | Jabatan   | Biaya Pemetian | Biaya Angkutan         |
|----|---|----------------|------------------------|
| 1  | 2   | 3              | 4                      |
| 1  | Bupati/Ketua DPRD   | Rp.4.000.000   | tarif sesuai kenyataan |
| 2  | Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD   | Rp.3.500.000   | tarif sesuai kenyataan |
| 3  | Sekretaris Daerah/Anggota DPRD  | Rp.3.500.000   | tarif sesuai kenyataan |
| 4  | Eselon II b   | Rp.2.500.000   | tarif sesuai kenyataan |
| 5  | Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan , Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan, dan ASN Golongan IV | Rp.2.000.000   | tarif sesuai kenyataan |
| 6  | PNS Gol III, II dan I / PPPK Gol IX, Gol X, Gol V dan Gol VII   | Rp1.000.000    | tarif sesuai kenyataan |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN  
Nomor : .....

Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah  
Kabupaten Madiun.  
2. Surat Perintah Tugas Nomor : ..... Tanggal .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (Nama yang melaksanakan SPT)

NIP : .....

Pangkat/ Golongan : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas tersebut di atas, saya sebagai peserta kegiatan:

Nama Kegiatan : .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

dengan ini saya menyatakan bahwa :

- saya sebagai peserta kegiatan tersebut, tidak menerima biaya transportasi dan uang saku/harian dari panitia kegiatan.
- biaya transportasi dan uang saku/harian akan kami bebankan pada APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ..... ,pada Rekening Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Daerah.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Perangkat Daerah,

Madiun , .....  
Yang membuat Pernyataan,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERINTAH TUGAS  
( SPT )

Nomor : .....

Dasar : .....

MENUGASKAN:

Kepada : Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

untuk melaksanakan tugas:

a. ....

b. ....

Demikian Surat Tugas ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Madiun  
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

Pangkat

NIP.

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 151 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
 DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN MADIUN

( Halaman Depan )



KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)  
 Nomor: .....

|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah                          |                                 |
| 2. | Nama Pegawai yang diperintah                                     |                                 |
| 3. | a. Pangkat ( Golongan/Ruang )<br>b. Jabatan                      |                                 |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas  |                                 |
| 5. | Tempat Tujuan  |                                 |
| 6. | Alat angkut yang dipergunakan                                    |                                 |
| 7. | a. Tanggal berangkat<br>b. Tanggal kembali<br>c. Lama Perjalanan |                                 |
| 8. | Pembebanan Anggaran  | a. Instansi<br>b. Mata Anggaran |
| 9. | Keterangan Lain-lain   | :                               |

Dikeluarkan di Madiun  
 pada tanggal  
 Pejabat Yang Berwenang,

(.....)  
 NIP

( Halaman Belakang )

Berangkat dari : Madiun  
Ke :  
Pada tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)  
NIP

|     |  |   |
|-----|--|---|
| I   | Tiba di :.....<br>Pada tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>(.....)<br>NIP   | Berangkat dari :.....<br>Menuju ke : .....<br>Pada Tanggal : .....<br><br>(.....)<br>NIP  |
| II  | Tiba di :.....<br>Pada tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>(.....)<br>NIP   | Berangkat dari :.....<br>Ke : .....<br>Pada Tanggal : .....<br><br>(.....)<br>NIP   |
| III | Tiba di :.....<br>Pada tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>(.....)<br>NIP   | Berangkat dari :.....<br>Ke : .....<br>Pada Tanggal : .....<br><br>(.....)<br>NIP   |
| IV  | Tiba di :<br>(Tempat Kedudukan)<br>Pada Tanggal :<br><br>Pejabat Yang Berwenang<br><br>(.....)<br>NIP  | Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas di lakukan atas perintah pejabat yang berwenang.<br><br>Pejabat Yang Berwenang<br><br>(.....)<br>NIP |
| V   | Catatan Lain-lain  |   |
| VI  | PERHATIAN<br>Pajabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya |   |

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN  
MADIUN

Buku Kas No :  
Kode Kegiatan :  
Kode Rekening :

KWITANSI DINAS

Terima dari :.....  
Uang Sejumlah : Rp.....(.....)  
Buat Bayar : Biaya Perjalanan Dinas ke....dalam rangka....tanggal....  
dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RBPD) sebagai  
berikut  
Biaya Transportasi :  
Uang Harian :  
Uang Penginapan :  
Uang Representasi :  
  
Jumlah : \_\_\_\_\_

Dibayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran  
Pembantu,

Madiun,  
Yang Menerima,

-----  
Pegguna Anggaran /  
Kuasa Pegguna Anggaran,

-----  
PPTK,

-----  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

-----  
TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....  
NIP :.....  
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami sampaikan daftar pengeluaran sebagaimana bukti pengeluaran terlampir :

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
|    |                 |        |
|    |                 |        |

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
PA/ KPA,

.....

NIP.....

Madiun,  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

NIP. ....

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....  
NIP :.....  
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya transport dan akomodasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi:

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
|    |        |        |
|    |        |        |
|    |        |        |
|    | Jumlah |        |

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
PA/ KPA,

Madiun,.....  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....  
NIP.....

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR : Surat Perintah Tugas Kepala .....  
Kabupaten Madiun Nomor : 094/  
..... / ..... / .....
- II. MAKSUD TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS :
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK / ARAHAN YANG :  
DIBERIKAN
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN-SARAN :
- X. LAIN-LAIN :

PELAPOR,

(.....)

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor : .....

Tanggal : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP : .....

Pangkat/ Golongan : .....

Jabatan : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya tidak jadi (batal) melaksanakan tugas dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas di atas disebabkan karena ..... (*alasan batal*).
- b. sehubungan dengan pembatalan dimaksud saya bersedia mengembalikan seluruh biaya uang harian yang sudah diberikan/ditransfer ke Rekening pribadi saya;
- c. untuk beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan akan dihitung sebagai pengeluaran yang sah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rekening Belanja Perangkat Daerah ..... Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ..... . (*bukti pengeluaran terlampir*).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun , .....

Mengetahui,  
Kepala Perangkat Daerah,

Yang membuat Pernyataan,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Sehubungan untuk keperluan serta kepentingan Dinas dan pertimbangan Teknis pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah..... Kabupaten Madiun, dengan ini Kepala/Pejabat pemberi perintah tugas Perjalanan Dinas, mencabut dan membatalkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas, Nomor : ....., Tanggal ..... yaitu:

Nama Kegiatan : .....

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

Selanjutnya atas pembatalan Perjalanan Dinas tersebut, seluruh beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan dapat dibebankan dan dihitung sebagai pengeluaran biaya perjalanan dinas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan perhatian.

Madiun , .....

Pejabat yang Berwenang/  
Pemberi Tugas

(.....)

Pangkat  
NIP.

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MADIUN NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

**PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d .....
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20...  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

|                      |
|----------------------|
| Materai<br>Rp 10.000 |
|----------------------|

 ttd

.....

---

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO